

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 14
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perum Bulog
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Kamis, 21 November 2019
Waktu : 10.30 s.d. 13.45 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : 1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019;
2. Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2020;
3. Membahas Peralihan Pelaksanaan Program Beras Rastra;
4. Isu-isu Aktual.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F.PDIP)
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo
Hadir : A. Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Budi Waseso (Direktur Utama Perum Bulog);
2. Gatot Trihargo (Wakil Direktur Utama Perum Bulog);
3. Bachtiar Utomo (Direktur Pengadaan);
4. Imam Subowo, M.M. (Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri);
5. Bagya Mulyanto (Direktur SDM dan Umum);
6. Tri Wahyudi Shaleh (Direktur Operasional dan Pelayanan Publik);
7. Triyana (Direktur Keuangan);
8. Mansur (Direktur Komersial).

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Utama Perum Bulog membahas Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019, Rencana Kerja Program dan Kegiatan Tahun 2020, membahas Peralihan Pelaksanaan Program Beras Rastra, dan Isu-isu Aktual, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk melakukan penguatan dalam sinkronisasi dan harmonisasi baik regulasi maupun kebijakan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perum Bulog.
2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk memberikan penugasan kepada Perum Bulog dalam menjaga keterjangkauan distribusi, ketersediaan pasokan, dan stabilisasi harga pangan pokok melalui pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah khusus untuk komoditas beras, jagung, kedelai, gula, dan daging dengan memberikan modal kerja kepada Perum Bulog sesuai dengan tata aturan pemanfaatan yang disepakati antara Pemerintah dan Perum Bulog.
3. Komisi IV DPR RI mendukung Perum Bulog mengusulkan kepada Menko Perekonomian untuk mengeluarkan keputusan persetujuan pengeluaran 150.000 ton Cadangan Beras Pemerintah setiap bulannya dengan mekanisme Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga *targeted* secara langsung kepada 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), melalui titik distribusi tertentu yang tersebar di Indonesia.
4. Komisi IV DPR RI mengusulkan agar Pemerintah segera menyusun kebijakan Cadangan Beras Pemerintah yang penyalurannya dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai atau Kartu Sembako dengan harga yang tepat dan kualitas yang baik kepada masyarakat berpendapatan rendah serta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, dan BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Komisi IV DPR RI mendukung upaya Perum Bulog untuk menyediakan beras dan pangan berfortifikasi sebagai bagian dari upaya meningkatkan gizi masyarakat maupun percepatan pencegahan penanganan *stunting*.
6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera menyusun kebijakan yang bersifat mandatori agar seluruh beras dan pangan yang dikelola Perum Bulog disalurkan wajib berfortifikasi.

7. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera membentuk Badan Pangan Nasional sesuai amanat UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan menunjuk Perum Bulog sebagai Lembaga Pemerintah yang melaksanakan penugasan di bidang pangan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.45 WIB.

Direktur Utama Perum Bulog,

Ttd.

Budi Waseso

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151